

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT BPR RUDO INDOBANK  
TAHUN 2022**



**Jl. Brigjend Katamso No 52 C-D SEMARANG  
TELEPON: (024) 76440998**

# **LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

## **PT. BPR RUDO INDOBANK**

### **TAHUN 2022**

---

#### **I. PENDAHULUAN**

Memasuki masa pemulihan dari kondisi Pandemi Covid 19 tahun 2022, memperlihatkan seluruh sektor keuangan memiliki optimisme dalam melangkah membenahi kondisi perekonomian Nasional. Hal ini menjadikan sektor Perbankan, khususnya BPR Rudo Indobank memiliki harapan besar ikut serta dalam rangka pemulihan ekonomi Nasional.

PT. BPR Rudo Indobank berpedoman pada prinsip tata kelola (*Good Corporate Governance*) yang baik. Prinsip-prinsip Tata Kelola diantaranya adalah keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Aspek transparansi penerapan Tata Kelola BPR ini merupakan salah satu cakupan dari kewajiban pelaporan penerapan Tata Kelola.

Penerapan Tata Kelola paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
- d. penanganan benturan kepentingan;
- e. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
- f. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- g. batas maksimum pemberian kredit;
- h. rencana bisnis BPR;
- i. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Hasil penerapan Tata Kelola tahun ini menjadikan cerminan agar ke depan terus menerus melakukan evaluasi agar ke depan dapat semakin baik.

Semoga keberadaan BPR Rudo Indobank di tengah masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung keberhasilan peningkatan perekonomian. Berikut hasil penerapan Tata Kelola PT. BPR Rudo Indobank untuk tahun 2022.

## **II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR RUDO INDOBANK**

### **A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola**

#### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Pebruono
	NIK :
	Jabatan : Direktur Utama sekaligus Dir. Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Bertanggung jawab penuh melaksanakan kepengurusan BPR. b. Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan c. Memastikan budaya kepatuhan, sadar risiko dan penerapan tata kelola terlaksana dengan baik. d. Memastikan tindaklanjut atas temuan terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
2.	Nama : Yulius Sri Mulyanto
	NIK :
	Jabatan : Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional perusahaan sesuai dengan Rencana Bisnis BPR yang disusun Direksi dan disetujui Dewan Komisaris. b. Menjalankan strategi operasional Bank dengan mengindahkan limit risiko internal dan berbatas pada toleransi risiko. c. Bertanggung jawab atas pengarahan, perencanaan,

	<p>pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian dalam bidang operasional Bank(bisnis bank) penyaluran kredit berikut pengelolaan risiko yang mengikuti.</p> <p>d. Memberikan putusan dan memastikan bahwa penyaluran kredit Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian.</p> <p>e. Memastikan budaya kepatuhan, sadar risiko dan penerapan tata kelola terlaksana dengan baik.</p>
	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</p> <p>a. Posisi dana BPR Rudo dalam posisi lebih dibandingkan target yang ada, dan tidak berbanding lurus terhadap pelemparan dana pada kredit. Sehingga dana idle yang tidak produktif semakin bertambah, dan berbanding lurus terhadap biaya dana yang dikeluarkan sangat besar. Direksi akan mempertimbangkan dalam pemberian bunga penempatan Deposito baru khususnya.</p> <p>b. Strategi pembatasan zonasi wilayah penyaluran kredit tetap dilaksanakan, dengan tetap mempertimbangkan potensi prospek dan risiko. Agar kredit terhindar dari risiko jarak yang jauh sehingga menjadi kendala penanganan yang tidak dapat ditangani. Evaluasi zonasi dapat dilakukan atau diperluas dengan tetap wajib mempertimbangkan nilai NPL yang sudah membaik.</p> <p>c. Guna mendukung kebijakan bunga promo guna mengejar target pertumbuhan di tahun 2022, Manajemen telah merilis kebijakan promo bunga kredit 0,65%, yang merupakan hasil evaluasi promo sebelumnya yakni 0,7%/bulan. Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam bentuk memo Intern Direksi yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2022. Promo bunga kredit tersebut akan diimbangi promosi. Berikut bentuk promosi guna mendukung hal tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana promosi yang akan dipergunakan adalah pemasangan spanduk promo di 30 titik untuk wilayah sekitar kantor pusat/ K. Kas dan 30 titik untuk wilayah cabang Ngaliyan. Kegiatan sebar brosur secara massal oleh tim bisnis setiap seminggu sekali sampai dengan kegiatan grebek pasar.</li> <li>• Sarana media sosial tetap dipergunakan semaksimal mungkin, akan disajikan konten promosi medsos di</li> </ul>

tanggal 5 Juli 2022 sebagai puncak acara HUT BPR Rudo ke 21.

- d. Sehubungan dengan berakhirnya program pemberian relaksasi kredit yang terdampak Covid 19, maka Direksi menginstruksikan agar monitoring berdasarkan hasil stress test wajib ditindaklanjuti dengan melakukan pemilahan dari seluruh daftar kredit relaksasi. Sehingga dapat dilakukan klasifikasi kategori dalam melakukan penilaian ulang dengan berdasar kondisi dan kemampuan Debitur saat ini.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Wahyu Mustikasari
	NIK :
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS serta bertanggung jawab penuh kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas pelaksanaan pengawasan perseroan. b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi c. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi dan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perseroan.
2.	Nama : Yulli Irawati
	NIK :
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan

	<p>perundang – undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS serta bertanggung jawab penuh kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas pelaksanaan pengawasan perseroan.</p> <p>b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi</p> <p>c. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi dan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perseroan.</p>
	<p>Rekomendasi kepada Direksi :</p> <p>a. Posisi dana BPR Rudo Indobank dalam posisi lebih dibandingkan target yang ada, dan tidak berbanding lurus terhadap pelemparan dana pada kredit. Sehingga dana idle yang tidak produktif semakin bertambah, dan berbanding lurus terhadap biaya dana yang dikeluarkan sangat besar. Sampai saat ini Direksi telah mengeluarkan kebijakan terkait pemberian counter rate untuk penempatan Deposito baru dibawah Rp. 500 juta, diharapkan kebijakan tersebut dapat menahan sementara bertambahnya dana pihak ketiga dalam bentuk Deposito. Kebijakan hendaknya tetap dievaluasi mempertimbangkan apabila dana yang dilempar dalam bentuk kredit semakin meningkat.</p> <p>b. Strategi zonasi wilayah pemasaran kredit agar selalu dilakukan evaluasi, mengingat saat ini NPL belum terdapat penurunan secara signifikan. Dengan melakukan pertimbangan dari seluruh risiko yang ada.</p> <p>c. Adanya program bunga promo yang dilaksanakan hendaknya dibarengi dengan kegiatan promosi yang mendukung kebijakan Direksi.</p> <p>d. Kredit yang mendapatkan relaksasi covid 19 agar wajib diperhatikan, mengingat kemungkinan kebijakan tidak lagi diperpanjang dan jatuh tempo pada 31 Maret 2023, dimana pandemi covid berubah menjadi indemi covid. Berdasarkan pantauan Dekom bahwa di posisi Juli 2022 banyak Debitur</p>

yang sudah jatuh tempo dan terdapat tunggakan lebih dari 3 x. Sesuai saran/ masukan Dewan Komisaris sebelumnya bahwa pengelompokkan debitur relaksasi tersebut dipilah apabila yang benar-benar lancar dan mampu agar dilakukan pengembalian ke status kredit non relaks/normal, kemudian untuk yang dinilai benar-benar tidak mampu agar dapat dilakukan penyelesaian sampai dengan dimungkinkan pilihan terakhir penjualan jaminan atau aset debitur.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Dalam hal ini PT. BPR Rudo Indobank **belum memiliki kewajiban** untuk pembentukan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Pebruono		0	0
2.	Yulius sri Mulyanto		0	0

Dalam hal ini dipastikan bahwa Direksi tidak memiliki hak saham di PT. BPR Rudo Indobank.

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No .	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nom inal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Pebruono		-	0	0
2.	Yulius sri Mulyanto		-	0	0

Dalam hal ini dipastikan bahwa Direksi tidak memiliki saham di Bank/ perusahaan lain.

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Pebruono		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Yulius Sri Mulyanto		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Pebruono		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Yulius Sri Mulyanto		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Wahyu Mustikasari		0	0
2.	Yulli Irawati		0	0



2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	San di Bank Lain	Nominal (Rp)	Perse ntase Kepe milika n (%)
1.	Wahyu Mustikasari		-	0	0
2.	Yulli Irawati		-	0	0

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Wahyu Mustikasari		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Yulli Irawati		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anngota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Wahyu Mustikasari		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Yulli Irawati		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket / Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2 (dua)	Rp.342.000.000	2 (dua)	Rp. 362.700.000
2.	Tunjangan	2 (dua)	Rp.185.400.000	2 (dua)	Rp. 42.000.000
3.	Tantiem	0	0	0	0
4.	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5.	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
Total			Rp. 567.000.000		Rp. 404.700.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Ada, diikutsertakan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.	Ada, diikutsertakan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada

#### G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4.48 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.20 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.06 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.35 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2 : 1

#### H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

##### 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
1.	12 April 2022	2 (dua)	Pencapaian kinerja, pencapaian kinerja dibandingkan RBB 2022. Pengawasan terhadap pelaksanaan RBB 2022 triwulan I tahun 2022 dan pemberian saran kepada Direksi. Evaluasi

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
			Kinerja triwulan I tahun 2022, konsistensi pelaksanaan strategi RBB 2022.
2.	12 Juli 2022	2 (dua)	Pencapaian kinerja Triwulan II dan pencapaian target RBB 2022 sampai dengan triwulan II tahun 2022 dan pemberian saran kepada Direksi. Evaluasi tingkat kesehatan Bank di semester I tahun 2022. Pelaksanaan dan kinerja PE Fungsi Audit Internal, Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
3.	10 Oktober 2022	2 (dua)	Pencapaian kinerja Triwulan III dan pencapaian target RBB 2022 sampai dengan triwulan III tahun 2022 dan pemberian saran kepada Direksi. Evaluasi Kinerja triwulan III tahun 2022. Proses penyelesaian pindah Gedung mulai dari pelaksanaan sesuai anggaran RBB 2022 sampai dengan perijinan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan.

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
4	10 Januari 2023	3 (tiga)	Pengawasan terhadap pelaksanaan RBB 2021 triwulan IV tahun 2021 dan pemberian saran kepada Direksi. Dan pemastian tindak lanjut hasil temuan Audit. Pelaksanaan rapat turut diundang Direksi sebagai peserta.

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Wahyu Mustikasari		4	0	100%
2.	Yulli Irawati		4	0	100%

Dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2022 Dewan Komisaris tidak melaksanakan bukti kehadiran melalui media virtual/ telekonferensi. Seluruhnya adalah kehadiran fisik/ pertemuan.

### I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum Nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud Telah Disele-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	saikan							
Dalam proses penyelesaian diinternal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindak lanjuti Melalui proses hukum		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

#### J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah(Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap)	2	0
Dalam Proses Penyelesaian	3	0
Total	5 (Lima)	0

Selama tahun 2022 terdapat lima permasalahan hukum yang dihadapi, Dari 5 masalah hukum yang dihadapi seluruhnya berkaitan dengan wanprestasi debitur.

### K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rp)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	0	-

### L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	17 Januari 2022	Sosial	Sumbangan pembelian lampion dan lilin untuk klenteng.	Klenteng Hwie Wie Kiong Semarang	Rp. 1.250.000,-
2.	25 Februari 2022	Sosial	Sumbangan Pelaksanaan acara Isra Mi'raj dan Harlah NU 99	Kelurahan Tlogosari Wetan Kota Semarang	Rp. 200.000,-
3.	23 Maret 2022	Sosial	Sumbangan pembelian lilin klentheng	Klenteng Tri noto Buko Bawono	Rp. 2.700.000,-
4.	25 Maret 2022	Sosial	Sumbangan Pembelian Tropy untuk lomba hari Paskah	TK Sola Gratia	Rp. 140.000,-
5.	22 April 2022	Sosial	Rudo berbagi Berkah Ramadhan, berupa sembako	Wraga lingkungan kantor kas, Kantor Pusat,dan Kantor Cabang.	Rp. 6.390.000,-
6.	29 Juni 2022	Sosial	Sumbangan berupa Sembako	Yayasan Soegijapranoto	Rp. 1.914.900,-
7.	04 Juli 2022	Sosial	Bakti Sosial dan pemberian sembako	Panti Asuhan	Rp. 3.000.000,-

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
				Cacat Ganda Bhakti Asih	
8.	07 Juli 2022	Sosial	Memperingati Hari Raya Qurban, penyaluran hewan Qurban 4 ekor kambing.	Wraga lingkungan sekitar Ngaliyan dan Jl Wolter Munginsidi.	Rp. 14.250.000,-
9.	08 Juli 2022	Sosial	Sumbangan untuk peresmian Gereja GKPII	Gereja GKPII Kidron Kota Semarang	Rp. 300.000,-
10.	11 Agustus 2022	Sosial	Partisipasi perayaan HUT RI ke 77	Warga Kelurahan Tlogosari Wetan	Rp. 250.000,-
11.	11 Agustus 2022	Sosial	Partisipasi perayaan HUT RI ke 77	Karang Taruna Kel Brumbungan	Rp. 200.000,-
12.	09 Desember 2022	Sosial	Sumbangan untuk Klentheng	Klenteng Ling Hok Bio	Rp. 3.002.000,-

Seluruh pemberian dana bertujuan untuk kegiatan sosial, sampai dengan akhir tahun 2022 PT. BPR Rudo Indobank tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.



### III. HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR RUDO INDOBANK

Hasil penilaian Penerapan Tata Kelola PT. BPR Rudo Indobank tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Nomor	Faktor	Penilaian Faktor	Kesimpulan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 2.33	0.466	Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Direksi : Sampai dengan posisi Desember 2022 BPR Rudo telah memenuhi jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan. Hal ini menjadikan BPR Rudo terus berusaha memaksimalkan dari seluruh lini dalam penerapan tata kelola
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 2.1	0.315	pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Dewan Komisaris : Secara struktur telah terpenuhi sesuai ketentuan OJK. Pada Januari 2022 telah terpenuhi jumlah anggota Komisaris sesuai ketentuan
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	0	kelengkapan dan pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite : pada faktor ini diberikan nilai nol dikarenakan BPR Rudo masuk dalam kategori bobot B dimana belum memiliki kewajiban pembentukan komite.
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 3	0.3	Penanganan benturan kepentingan, pedoman benturan kepentingan sudah ada. Pada posisi sampai dengan akhir 2022 belum terdapat indikasi transaksi yang memiliki benturan kepentingan.
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 2.42	0.242	Penerapan Fungsi Kepatuhan : Penerapan budaya kepatuhan di seluruh lini terus dilaksanakan secara optimal, dan dibutuhkan peningkatan kesadaran seluruh SDM pada organisasi. Tanggung jawab Direksi dan pengawasan oleh Dewan Komisaris wajib dilaksanakan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.
B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 2.43	0.243	Penerapan Fungsi Audit Intern : BPR Rudo Indobank telah mengangkat PE Audit Intern, secara SDM mampu melaksanakan penerapan audit intern secara menyeluruh. Pemeriksaan harus dapat secara komprehensif tentang gambaran kondisi intern bank, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tetap harus dilakukan pemantauan sesuai komitmen
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 2	0.05	Penerapan Fungsi Audit Ekstern : BPR Rudo telah melakukan penunjukkan AP dan KAP melalui hasil RUPS, dan telah dilaporkan kepada OJK.
B0800	Penerapan manajemen risiko	0.251	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem : BPR Rudo telah

	termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 2.51		memiliki PE Manajemen Risiko, dan telah memiliki pedoman Manajemen risiko serta penetapan limit.
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 3	0.225	Batas Maksimum Pemberian Kredit : Pedoman Kredit telah dimiliki, seluruh keputusan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Sampai dengan saat ini BPR Rudo belum pernah melakukan pelanggaran pelanggaran BMPK.
B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 3	0.225	Rencana Bisnis BPR : BPR Rudo telah menyusun RBB dan telah dilaporkan kepada OJK. Pelaksanaan RBB tetap dilakukan pengawasan agar dapat berjalan maksimal.
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 2.95	0.221	Transparansi Kondisi Keuangan dan non Keuangan : BPR Rudo melaporkan seluruh kondisi secara transparan, dan terus dilakukan secara berkesinambungan
Nilai Komposit		2,5	
Peringkat Komposit		2	
Predikat Komposit		Baik	

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Secara menyeluruh BPR Rudo Indobank telah menerapkan Tata Kelola, hasil penilaian terhadap penerapan Tata Kelola belum dapat disimpulkan optimal meskipun dengan predikat baik. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat kekurangan dan kendala dalam menjalankan pelaksanaannya. Pada penilaian tahun 2021 dihasilkan nilai komposit sebesar 2.5 dengan predikat Baik dan tidak berubah untuk penilaian tahun 2022 dihasilkan nilai 2.5 dengan predikat Baik.

#### IV. PENUTUP

Demikian Laporan Tata Kelola PT. BPR Rudo Indobank tahun laporan 2022 untuk periode penilaian posisi Desember 2022. Laporan ini disusun sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/ POJK.03/2015, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/ SEOJK.03/2020 perihal Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. Dengan disusunnya laporan pelaksanaan Penerapan tata kelola ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan/ *stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban dan kewajaran BPR. Demikian Laporan ini disampaikan, Terima kasih.

Semarang, 17 Januari 2023  
PT. BPR RUDO INDOBANK

Ttd

		
<b>Wahyu Mustikasari</b> Komisaris Utama		<b>Pebruono</b> Direktur Utama